

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

**PROVINSI :** PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** BADAN PENGHUBUNG PROV.KEP.BANGKA BELITUNG

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran Serta Realisasinya	1 Program	Lihat di APBD Lampiran 1.3 (Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP Penyewaan Penginapan 2. SOP Humas dan Layanan Protokoler 3. SOP Fasilitasi Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 4. SOP Proses Urusan Hubungan Kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah, Non Departemen dan Swasta di Jakarta 5. SOP Informasi dan Investasi	5 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh menteri pembina teknis.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Peraturan Yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (PERDA/PERKADA Yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau Tidak Ada	Apabila ada sebutkan - PERDA pelaksanaan sebanyak .1 Perda. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1.	Ada 100%	Sumber data di Biro Hukum

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 5</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 5</li> </ul>	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional ada 2 jabatan yaitu : Jabatan Fungsional Arsiparis, dan Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat	Ada	Sumber data BKD/perangkat daerah terakhir/update tahun 2019
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS sebanyak 26 personil</li> <li>- Total PNS Provinsi, sebanyak 5.469 personil</li> </ul>	0,48%	Mengacu kondisi OPD terakhir / updated Tahun 2019
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan , sebanyak 1 org.</li> <li>- Pejabat, yang ada sebanyak 5 org.</li> </ul>	20%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbt.</li> </ul>	100%	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- RENSTRA Perangkat Daerah</li> <li>- RENJA Perangkat Daerah</li> <li>- RKA-Perangkat Daerah</li> </ul>	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RENSTRA Perangkat Daerah</li> <li>2. RENJA Perangkat Daerah</li> <li>3. RKA-Perangkat Daerah</li> </ol>	3 jenis dokumen	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah , sebanyak 2 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 Program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-PD yang bersangkutan.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-PD tahun 2019 dan Renja-PD yang bersangkutan
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah , sebanyak 2 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah , sebanyak 2 program.	100%	Sumber data dari dokumen RKA-PD tahun 2019 dan dokumen DPA-PD ybs tahun 2019
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp19.832.687.040,-  - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp 3.064.703.819.549,99	0,65%	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir (anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp15.546.537.022,- - Total Realisasi Belanja Perangkat APBD, sebesar Rp 2.785.051.756.383,58	0,56%	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp12.371.346.770,-</li> <li>- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp15.546.537.022,-</li> </ul>	79,58%	Sumber data LRA Per Periode dalam Simda Keuangan
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp3.175.190.252,-</li> <li>- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp15.546.537.022,-</li> </ul>	20,42%	Sumber data LRA Per Periode dalam Simda Keuangan
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 2 jenis, sbb: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Keuangan Semester I</li> <li>2. Laporan Keuangan Semester II</li> </ol>	Ada sebanyak 2 jenis laporan keuangan	

7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen aset Perangkat Daerah	18	Adanya Inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.----- 1. Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah T.A. 2019 2. Buku Inventaris Gabungan	Ada	Sumber data dari Bidang Asset Daerah tahun 2019
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp24.899.368.654,-	0%	Sumber data dari Bidang Asset Daerah tahun 2019
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Pengumuman di Media Massa (Website) 2. Leaflet 3. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak - 3 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -- ---	tidak ada	

Jakarta, 2020  
Kepala Badan Penghubung  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Selaku Pengguna Anggaran



**Arie Primajaya, SE.M.Si**  
NIP. 19751231 200312 1 007